

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demi memenuhi tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi yang ditandai dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berganti menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, untuk kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, pemerintah daerah sudah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan (Sjafrizal, 2017). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Seiring dengan berjalannya reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia, pemerintah mulai memperkenalkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah. Perubahan dalam sistem penganggaran ini ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai”. Dalam Undang-Undang tersebut juga tercantum penjelasan mengenai tujuan diberlakukannya penerapan penganggaran berbasis prestasi kerja, yaitu sebagai upaya untuk

memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Kawedar *et al.*, 2011). Bastian (2010) menyatakan bahwa prestasi atau hasil kinerja dapat dilihat dengan syarat-syarat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, maka dari itu penilaian kinerja sering dikaitkan dengan *value for money*. Konsep *value for money* sangat sejalan dengan konsep anggaran berbasis kinerja, hal ini dikarenakan dalam proses pengelolaannya kedua konsep tersebut lebih memperhatikan komponen *input*, *output*, dan juga *outcome* yang ingin dicapai. Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* dapat menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Meskipun demikian, pemerintah selaku sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Mardiasmo, 2018). Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya fenomena yang terjadi terkait dengan pengelolaan anggaran di Indonesia, Presiden Joko Widodo bahkan mengkritisi politik anggaran yang selama ini dianut oleh para pengelola keuangan di instansi-instansi pemerintah. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, beliau menyebutkan bahwa meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah naik sebanyak 4 kali, namun hal ini tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi makro negara. Situasi ini terjadi karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja operasional, belanja rutin, dan belanja barang, seperti untuk perjalanan dinas, rapat ataupun seminar. Hal ini menyebabkan sumber daya hanya digunakan untuk belanja modal yang tidak produktif. Pernyataan Presiden Jokowi mengenai anggaran juga diberitakan oleh CNN Indonesia, dimana beliau mengatakan bahwa berdasarkan hasil temuannya masih banyak anggaran daerah yang tidak jelas kemanfaatannya

untuk masyarakat. Contoh yang sering terjadi adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya digunakan untuk suatu program seperti pengembangan UMKM, penyuluhan pertanian, atau program lainnya, justru lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan rencana awal yang telah ditetapkan.

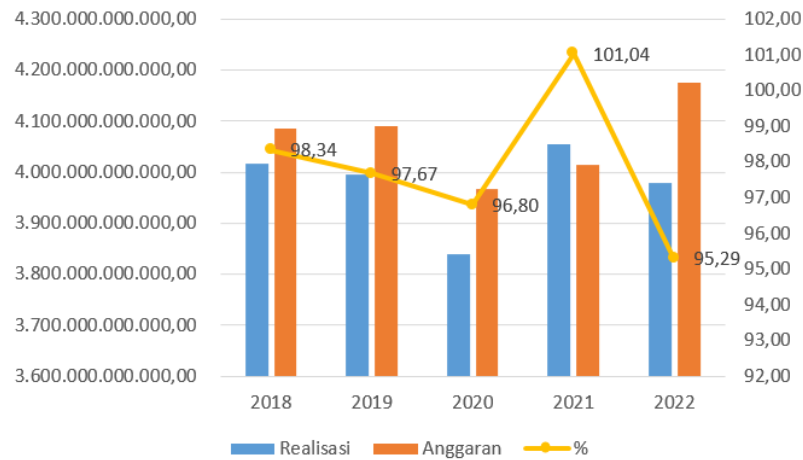
Permasalahan mengenai praktik anggaran hingga kini masih menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya, fenomena yang terjadi belakangan ini menyangkut tentang anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga. Dilansir dari laman CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa program-program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia, anggaran yang hampir menyentuh Rp500 triliun ini habis secara percuma untuk program rapat dan seminar pengentasan kemiskinan di hotel-hotel yang berujung hanya sebatas studi banding dengan tanpa adanya kebijakan yang jelas. Terkait politik anggaran tersebut, Presiden menekankan bahwa kepala daerah harus membuat dan memperhatikan prioritas dari APBD secara lebih detail. Presiden juga menghimbau adanya perubahan dari pola *“money follow function”* menjadi *“money follow programme”* pada manajemen anggaran daerah. Tujuannya adalah agar anggaran dapat dialokasikan dengan tepat sasaran sesuai dengan program prioritas masing-masing pemerintah daerah.

Mengutip dari laman Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022), kepala seksi pencairan dana dan manajemen satker mengatakan bahwa hingga saat ini pelaksanaan anggaran belanja pemerintah masih sering dihadapkan dengan masalah klasik yakni belum optimalnya penyerapan anggaran pada setiap tahun pelaksanaan anggaran pemerintah, proporsi daya serap anggaran belanja pegawai dan belanja operasional cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Selain rendahnya penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran masih dihadapkan dengan

permasalahan lain seperti tidak proporsionalnya penyerapan anggaran dalam tahun anggaran berjalan.

Permasalahan mengenai pengelolaan anggaran termasuk ke dalam isu strategis yang harus lebih diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Dalam Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat (2021), salah satu isu strategis pelaksanaan APBD pada tahun 2021 yaitu beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat masih belum dapat memaksimalkan penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kabupaten Cianjur termasuk ke dalam satu diantara banyaknya daerah yang belum dapat memaksimalkan penggunaan APBD sesuai dengan kebutuhan daerahnya, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (2021) yang menjelaskan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bidang urusan keuangan yaitu masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD yang ditunjukkan dengan belum tercapainya realisasi retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan serta belum maksimalnya penggalan potensi per sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Adapun kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur digambarkan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan pada gambar 1.1 berikut,



Sumber: cianjurkab.go.id (diolah)

Gambar 1. 1 Data Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

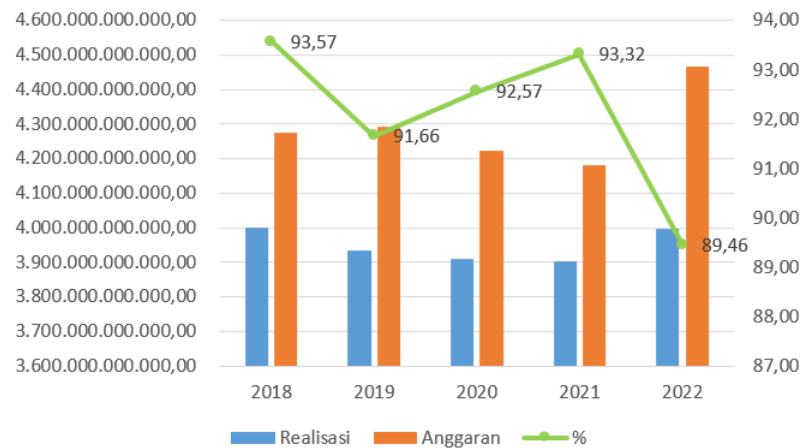
Dari hasil laporan realisasi anggaran pendapatan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2018-2022 belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp4.017.389.955.771,68 atau mencapai 98,34% dari target anggaran sebesar 4.085.021.388.832,55. Pada tahun 2019, terjadi penurunan persentase realisasi pendapatan menjadi 97,67% dari target anggaran sebesar Rp4.090.606.786.847,00 dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp3.995.406.433.639,81. Penurunan persentase realisasi pendapatan terulang kembali pada tahun 2020 dengan capaian 96,80% dari target anggaran sebesar Rp3.967.366.428.102,00 dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp3.840.501.662.318,66. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan persentase realisasi pendapatan menjadi 101,04% dari target anggaran sebesar Rp4.014.029.057.968,00 dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp4.055.699.463.229,00. Pada tahun 2022, terjadi penurunan persentase realisasi pendapatan yang cukup signifikan menjadi 95,29% dari target anggaran sebesar Rp4.175.495.411.304,00 dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp3.978.964.224.762,29.

Mikanti Annisa Sugrining Rahayu, 2024

PENGARUH TINGKAT AKUNTABILITAS, TINGKAT TRANSPARANSI, DAN TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selain berdasarkan realisasi anggaran pendapatan, disajikan pula laporan realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada gambar 1.2 berikut,



Sumber: cianjurkab.go.id (diolah)

Gambar 1. 2 Data Hasil Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Dari hasil laporan realisasi anggaran belanja di atas didapatkan informasi bahwa pada tahun 2018, diperoleh realisasi belanja sebesar Rp4.000.993.750.351,00 atau mencapai 93,57% dari target anggaran sebesar Rp4.275.870.974.875,95. Pada tahun 2019, terjadi penurunan persentase realisasi belanja menjadi 91,66% dari target anggaran sebesar Rp4.293.352.578.311,08 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp3.935.268.663.062,12. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan persentase realisasi belanja menjadi 92,57% dari target anggaran sebesar Rp4.221.750.139.559,77 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp3.907.923.809.123,74. Peningkatan persentase realisasi belanja terulang kembali pada tahun 2021 dengan capaian 93,32% dari target anggaran sebesar Rp4.180.990.622.620,00 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp3.901.614.454.481,01. Pada tahun 2022, terjadi penurunan persentase realisasi belanja yang cukup signifikan menjadi 89,46% dari target anggaran sebesar

Rp4.468.541.984.705,00 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp3.997.435.902.590,06.

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil laporan realisasi tersebut mengalami fluktuasi dimana realisasi APBD terkadang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, artinya masih terdapat ketidakstabilan dan perubahan yang tidak menentu atau tidak stabil dalam pelaksanaan APBD. Fenomena lain yang terjadi pada Kabupaten Cianjur dapat terlihat dari adanya penyerapan anggaran yang tidak dilakukan secara optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya persentase penyerapan anggaran selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Berikut disajikan persentase penyerapan anggaran periode tahun 2018-2022 berdasarkan laporan realisasi anggaran pada Kabupaten Cianjur.

Tabel 1. 1
Data persentase penyerapan anggaran periode tahun 2018-2022

dalam%

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	94,13	92,46	91,74	93,29	88,87
Belanja Pegawai	94,20	90,95	91,41	94,20	91,91
Belanja Barang dan Jasa	93,96	94,46	90,92	92,16	85,47
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53
Belanja Hibah	98,39	98,69	99,51	98,88	99,70
Belanja Bantuan Sosial	40,06	56,27	89,81	77,69	87,77
Belanja Modal	89,88	84,82	89,55	86,80	85,49
Belanja Modal Tanah	96,09	79,07	99,31	77,32	99,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,56	85,30	93,79	92,47	89,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84,60	80,01	81,96	75,71	91,30
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92,14	86,80	95,15	88,18	79,68
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98,52	95,76	99,37	99,87	77,72
Belanja Tidak Terduga	11,19	24,64	84,06	68,03	40,46
Belanja Tidak Terduga	11,19	24,64	84,06	68,03	40,46
Belanja Transfer	99,29	98,60	99,49	99,67	98,99
Belanja Bagi Hasil	59,51	49,97	79,91	99,73	86,26
Belanja Bantuan Keuangan	99,86	99,27	99,95	99,67	99,40
BELANJA DAERAH	93,57	91,66	92,57	93,32	89,46

Sumber: BKAD (diolah)

Mikanti Annisa Sugrining Rahayu, 2024

PENGARUH TINGKAT AKUNTABILITAS, TINGKAT TRANSPARANSI, DAN TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa selama 5 tahun berturut-turut, penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada belanja transfer dan belanja operasi. Anggaran dalam belanja transfer lebih banyak terealisasi untuk belanja bantuan keuangan dengan capaian persentase yang selalu menyentuh angka 99%, sedangkan anggaran dalam belanja operasi lebih banyak terealisasi untuk belanja hibah dan belanja pegawai dengan rata-rata persentase sebesar 99,03% dan 92,53%. Selain itu, diketahui pula bahwa secara konsisten, penyerapan anggaran yang rendah terutama terjadi pada belanja tidak terduga dan belanja modal. Persentase penyerapan anggaran belanja tidak terduga dan belanja modal sampai dengan tahun 2022 belum pernah mencapai angka $\geq 90\%$.

Hal tersebut sangatlah disayangkan, karena program atau kegiatan yang termasuk dalam belanja modal memiliki hubungan langsung dengan penggerak sektor perekonomian dan dapat ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dalam kaitannya dengan penyediaan barang publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2023) menyatakan bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan alokasi dana pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dari itu perlu adanya perhatian khusus untuk permasalahan penyerapan anggaran tersebut agar dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan dan persentase alokasi anggaran serta tidak proporsionalnya penyerapan anggaran tersebut menggambarkan bagaimana kinerja anggaran di Kabupaten Cianjur. Ditinjau dari sisi pemerintah, kondisi ini akan berpengaruh terhadap peran anggaran sebagai alat yang digunakan untuk menciptakan stabilitas perekonomian. Selain itu, belum optimalnya kinerja anggaran akan mengakibatkan terhambatnya potensi untuk menggerakkan perekonomian dan memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan anggaran dalam memacu pertumbuhan ekonomi, mendukung pembangunan daerah, serta mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran (Deslina, 2022).

Mikanti Annisa Sugrining Rahayu, 2024

PENGARUH TINGKAT AKUNTABILITAS, TINGKAT TRANSPARANSI, DAN TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penjelasan sebelumnya menandakan bahwa kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Kabupaten Cianjur belum diterapkan secara maksimal. Belum maksimalnya kinerja anggaran berkonsep *value for money* yang secara terus menerus terjadi pada setiap tahun akan berimbas kepada masyarakat. Tanpa pertimbangan *value for money*, anggaran pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran akan merugikan masyarakat karena tidak memberikan manfaat ataupun menghasilkan suatu nilai guna bagi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Pemerintah daerah sebagai suatu entitas dalam organisasi sektor publik menggunakan sebagian besar dana yang berasal dari publik untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan (Halim & Kusufi, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya pertanggungjawaban akan penggunaan dana serta peran anggaran yang wajib dilaporkan kepada publik agar tidak menimbulkan ketidaksinambungan perolehan informasi diantara kedua belah pihak. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat salah satu teori yang menjelaskan bagaimana permasalahan ketidaksinambungan informasi tersebut dapat terjadi, teori ini disebut dengan *Agency Theory* atau keagenan. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen *et al.*, 1976). Penjelasan ini sama halnya dengan hubungan yang terjadi antara pemerintah dan juga masyarakat atau publik. Hasil kerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dapat dilihat dari kinerja anggaran pemerintah.

Kinerja anggaran dapat dinilai berdasarkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggunakan konsep penganggaran berbasis kinerja yang di dalamnya memiliki 3 aspek dan 8 indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. Sedangkan dalam Sistem Monitoring Kinerja Terpadu, untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yang terdiri dari fungsi

Mikanti Annisa Sugrining Rahayu, 2024

PENGARUH TINGKAT AKUNTABILITAS, TINGKAT TRANSPARANSI, DAN TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas, digunakan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran (Pusparani, 2021).

Sistem pengukuran kinerja publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2018). Mardiasmo juga berpendapat bahwa *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah, dalam pelaksanaannya indikator kinerja sangat dibutuhkan untuk dapat menilai kinerja organisasi secara obyektif. Pengembangan indikator kinerja berfokus pada *value for money* yang memperhatikan aspek ekonomis yaitu hemat dan cermat dalam melakukan pengadaan dan pengalokasian sumber daya, aspek efisien yang berarti berdaya guna dalam menggunakan sumber daya untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan penggunaan, serta aspek efektif atau berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja berperan untuk membantu dan memudahkan pemerintah dalam penetapan putusan anggaran, pengkajian dan pengawasan alokasi dan penggunaan anggaran, serta pengawasan kinerja anggaran.

Selain berdasarkan perhitungan dan pengukuran seperti yang sudah dijelaskan di atas, di sisi lain, beberapa peneliti telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money*, salah satunya adalah faktor akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiyanningrum (2017), Laoli (2019), Batubara & Risna (2020), Shara *et al* (2020), dan Nata & Putra (2023) yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronika & Nugraeni (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas secara positif tidak mempengaruhi kinerja anggaran. Sedangkan menurut Arifani *et al* (2018) dan Ashari & Kaukab (2020) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Setiyanningrum (2017), Safitri & Mildawati (2019), dan Hermanto *et al* (2021) menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran

berkonsep *value for money*. Sependapat dengan penelitian tersebut, Arifani *et al* (2018), Ashari & Kaukab (2020), dan Veronika & Nugareni (2023) menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Namun, terdapat perbedaan dalam hasil penelitian Al-Hakim & Harnovinsah (2019), Laoli (2019), Shara *et al* (2020), dan Nata & Putra (2023) yang mengungkapkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Dalam penelitian terkait partisipasi yang dilakukan oleh Safitri & Mildawati (2019) menunjukkan hasil bahwa partisipasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mat *et al* (2022) yang mengemukakan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran.

Dilihat dari hasil penelitian–penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan yang mengakibatkan terjadinya *research gap* atau kesenjangan dalam hasil penelitian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal serupa yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam kinerja anggaran pemerintah daerah. Menurut Handayani & Nur (2019) *Good governance* sekurang-kurangnya harus dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) dari sembilan karakteristik pelaksanaan *good governance*, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*). Selain itu, dalam penelitian Iswahyudi *et al* (2016) lembaga internasional United Nations Development Program (UNDP), dan the Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa *good governance* yang baik harus melaksanakan minimal empat komponen dasar tata kelola yang baik, yaitu akuntabilitas, partisipasi, prediktabilitas (aturan hukum) dan transparansi. Dari beberapa pendapat di atas, dapat terlihat bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi lebih sering disinggung dan disepakati dapat menjadi karakteristik suatu

pemerintah dalam melaksanakan *good governance*. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk memilih ketiga faktor tersebut.

Dengan adanya *research gap* pada hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah, serta terjadinya fenomena–fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Akuntabilitas, Tingkat Transparansi, dan Tingkat Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur”**.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, tingkat partisipasi, dan kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana pengaruh tingkat akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana pengaruh tingkat transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah penelitian di atas, maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, tingkat partisipasi, dan kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Mengetahui pengaruh tingkat akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Mengetahui pengaruh tingkat transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Mengetahui pengaruh tingkat partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor–faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money*, khususnya faktor tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka peluang terciptanya ide penelitian baru untuk menguak lebih lanjut persoalan mengenai kinerja anggaran berkonsep *value for money* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan berguna sebagai tambahan informasi bagi pemerintah daerah terkait penilaian kinerja anggaran berkonsep *value for money* untuk meningkatkan kualitasnya agar meminimalisir terjadinya kasus yang melibatkan APBD atau APBN yang dapat menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Salah satunya adalah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selaku objek dalam penelitian ini.

Mikanti Annisa Sugrining Rahayu, 2024

PENGARUH TINGKAT AKUNTABILITAS, TINGKAT TRANSPARANSI, DAN TINGKAT PARTISIPASI TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

b. Bagi SKPD Kabupaten Cianjur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk pengelolaan anggaran yang berdasarkan pada faktor tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kinerja anggaran berkonsep *value for money* yang dijalankan oleh pemerintah selaku sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat ikut berkontribusi dalam mengevaluasi kinerja anggaran berkonsep *value for money* agar kualitas kinerja pemerintah semakin meningkat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi yang relevan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa terkait pengaruh tingkat akuntabilitas, tingkat transparansi, dan tingkat partisipasi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.